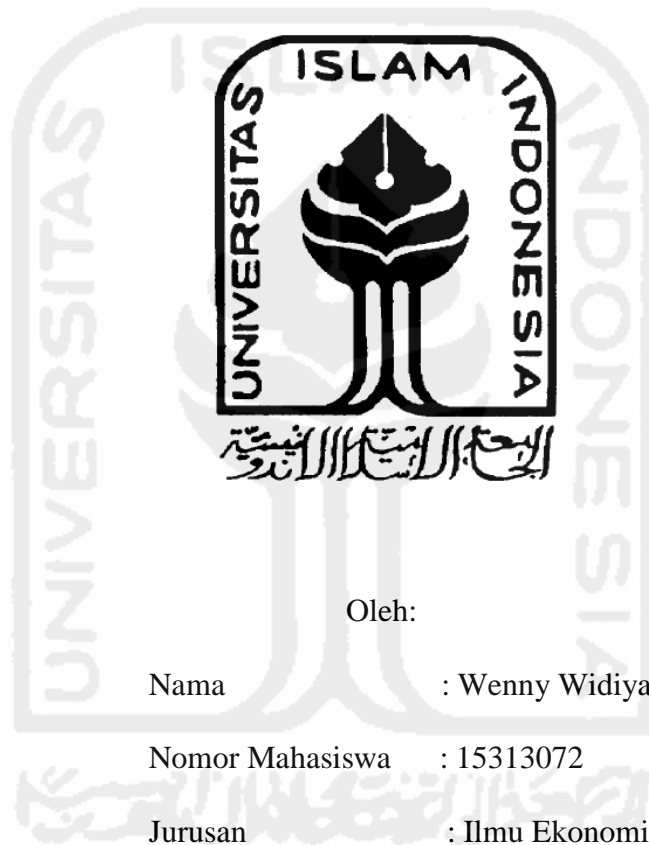


**PENGARUH PENDUDUK MISKIN, PAJAK DAERAH, PENGELUARAN
PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA
TOTAL BELANJA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

(Periode Tahun 2010-2014)

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Wenny Widiyanti

Nomor Mahasiswa : 15313072

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2016

**PENGARUH PENDUDUK MISKIN, PAJAK DAERAH, PENGELUARAN
PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA
TOTAL BELANJA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
(Periode Tahun 2010-2014)

SKIRPSI

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1
Jurusan Ilmu Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Wenny Widiyanti

Nomor Mahasiswa : 15313072

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa penulisan laporan magang ini dibuat dengan benar dan sungguh-sungguh tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari nanti terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya siap dan sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 6 Oktober 2016

Penulis,

WS



Wenny Widiyanti

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

Pengaruh Penduduk Miskin, Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah Bidang
Pendidikan dan Kesehatan Serta Total Belanja Terhadap Indeks Pembangunan
Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah
(Periode Tahun 2010-2014)

Nama : Wenny Widiyanti

Nomor Mahasiswa : 15313072

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Oktober 2016
Telah disetujui dan disahkan oleh,
Dosen Pembimbing



Jaka Sriyana
6/10/2016

(Jaka Sriyana, Dr.,SE.,M.Si.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PENDUDUK MISKIN, PAJAK DAERAH, PENGELUARAN PEMERINTAH
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA TOTAL BELANJA DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH (PERIODE TAHUN 2010-2014)**


Disusun Oleh : **WENNY WIDAYANTI**

Nomor Mahasiswa : **15313072**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 18 November 2016

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. 

Penguji : Rokhedri Priyo Santoso, SE., MIDEc 

Suharto, SE., M.Si. 

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia


Dr. D. Agus Harjito, M.Si. 

MOTTO

- ❖ “Aku tanpa ALLAH, Nothing!”
- ❖ “Barang siapa meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja maka janji Allah terlepas darinya” - HR. Ahmad)
- ❖ “Belajar, belajar, dan belajar! Ini untuk kalian yang nanti akan memanggilku UMMI.”
- ❖ “Wanita hanya ada dua pilihan, menjadi sebaik-baiknya Perhiasan atau menjadi sebesar-besarnya Fitnah.”
- ❖ “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” - Q.S Al Insyirah: 6-7
- ❖ “Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau mudahkan dan Engkau sanggup memudahkan kesulitan, jika Engkau menghendaki” – HR. Abu Dawud
- ❖ “Aku tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya.” - Q.S Al Baqarah: 286
- ❖ “Hanya dengan mengingatKu hati akan menjadi tenang.” - Q.S Ar Ra’ad: 28
- ❖ “Kalau lelah berdiri, bersandarlah. Kalau masih lelah, belajarlah sujud lebih lama.” - the one
- ❖ “Balasan kemaksiatan adalah lemah dalam beribadah dan sempit dalam rezeki.” - Ali Bin Abi Thalib Radiyallahu ‘anhu
- ❖ “1 hal yang membuat kita Bahagia adalah Kasih Sayang, 1 hal yang membuat kita Dewasa adalah Masalah, 1 hal yang membuat kita Hancur adalah Putus Asa, 1 hal yang membuat kita Maju adalah Usaha, dan 1 hal yang membuat kita Kuat adalah Doa.” - Ust. Bachtiar Nasir
- ❖ “Aku tidak takut doaku ditolak, tapi aku lebih takut jika aku tidak diberikan hidayah untuk terus berdoa.” – Umar Bin Khatib Radiyallahu ‘anhu
- ❖ “Jikalau engkau melihat ada seseorang yang mengunggulimu dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam urusan akhirat.” – Hasan Al Bashri
- ❖ “Aku tidak bangga menjadi lebih baik dari siapapun, tapi aku bangga menjadi lebih baik dari diriku yang dulu.” – Me
- ❖ “Bergelar SARJANA lebih mudah dibanding bergelar SHALIHAH yang sesungguhnya dimata ALLAH Subhanawata’ala. Itulah mengapa menggapai surga didunya lebih mudah daripada surga di akhirat. Pilih mana? DUNYA yang SEMENTARA atau AKHIRAT yang SELAMA-LAMANYA.” - Me

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ALLAH Subhanawata'ala yang telah mengatur semuanya ini dengan begitu baik atas ketetapanNya. Thanks oh Allah. Ini hanya setitik nikmat yang Engkau beri. Berkahi ini ya Allah.
 - Mamah dan Papah, terimakasih untuk apapun itu. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah kalian beri. Doaku untuk kalian disetiap helaan nafasku.
 - Kedua adikku yang kembar, terimakasih doa dan supportnya dek.
 - Keluarga dan sahabat-sahabatku terkasih, terimakasih atas doa, semangat, dukungan, nasehat, masukan dan bantuannya. Jazakumullah khairan katsiran, Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.
 - Buat teman-teman keluarga besar IE dan D3 Ekonomi UII terimakasih, semoga kalian sukses dan semoga Allah meridhoi setiap langkah kalian.
- Barakallahu Fiik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, hidayah dan karunianyalah penyusunan Skripsi yang berjudul “ PENGARUH PENDUDUK MISKIN, PAJAK DAERAH, PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA TOTAL BELANJA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SULAWESI TENGAH (Periode Tahun 2010-2014)” dapat terselesaikan.

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

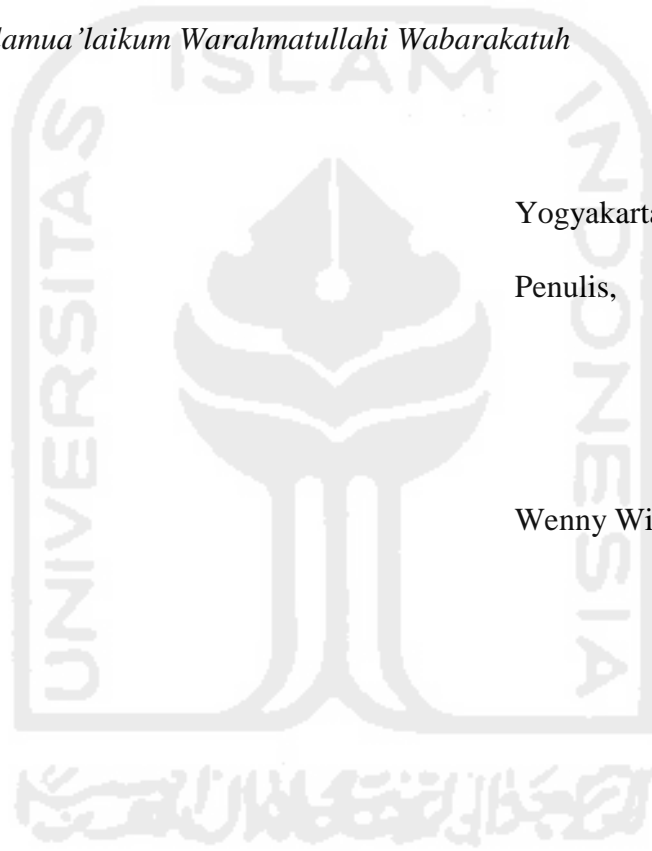
Penulis sadar bahwa dalam penyusunan Skripsi ini terdapat banyak kendala yang dihadapi namun berkat semua pihak yang telah membimbing, membantu, dan memberi masukan atas tulisan yang penulis buat ini serta atas dukungan dan doa, sehingga kendala tersebut dapat teratasi.

Oleh karena itu, tak salah kiranya penulis menghaturkan ungkapan rasa banyak terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Suryono, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Jaka Sriyana, Dr.,SE.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Akhsyim Affandi, MA, Ph.D selaku kepala jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Dosen dan Staf karyawan UII Yogyakarta yang telah mewariskan ilmunya kepada kami dengan tulus.
6. Kedua Orang Tua Tercinta dan Kedua Adik Kembar Penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa dari awal hingga akhir.
7. Seluruh Teman-Teman Fakultas Ekonomi yang sekiranya pernah saling membantu, saling memberi semangat satu sama lain dan bekerja sama selama ini.
8. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena terlalu banyaknya, yang telah berpartisipasi sehingga laporan Skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Penulis juga tidak menutup diri atas saran dan kritikan. Serta kita mengambil kelebihan dari hasil penulisan laporan magang ini sebagai pembelajaran dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassallamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Yogyakarta, 6 Oktober 2016

Penulis,

Wenny Widiyanti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvii
Daftar Lampiran	xviii
Abstrak	xix
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Sistematika Penulisa	14
BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Kajian Pustaka	16

2.2.	Landasan Teori	21
2.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia	21
2.2.2.	Kemiskinan	26
2.2.3.	Indikator Kemiskinan	28
2.2.4.	Karakteristik atau Ciri-ciri Penduduk Miskin	33
2.2.5.	Pajak Daerah	35
2.2.6.	Pengeluaran Pemerintah	35
2.2.7.	Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan	37
2.2.8.	Total Belanja	40
2.2.9.	Hipotesis Penelitian	42

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1.	Variabel Penelitian	43
3.2.	Jenis dan Sumber Data	43
3.3.	Metode Penelitian	44
3.3.1.	<i>Pooled Least Square</i> (PLS) atau <i>Common Effect</i>	44
3.3.2.	Fixed Effect Model (FEM)	45
3.3.3.	Random Effect Model (REM)	46
3.4.	Pemilihan Model	48
3.4.1.	Uji Signifikansi <i>Common Effect</i> atau <i>Fixed Effect</i>	49
3.4.2.	Uji LM Test	49
3.4.3.	Uji Hausman Test	50

3.5. Pengujian Statistik	50
3.5.1. Koefisien Determinasi (R^2)	51
3.5.2. Uji F	51
3.5.3. Uji T	52

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.1.1. Sejarah Sulawesi Tengah	53
4.1.2. Geografis dan Demografis	53
4.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.....	57
4.2. Hasil Regresi Data Panel	64
4.2.1. Estimasi <i>Pooled Least Square</i> atau <i>Common Effect</i>	66
4.2.2. Estimasi <i>Fixed Effect</i>	67
4.2.3. Estimasi <i>Random Effect</i>	68
4.3. Pemilihan Model	69
4.3.1. <i>Likelihood Ratio Test (Chow Test)</i>	70
4.3.2. <i>Hausman Test</i>	71
4.4. Analisis Hasil Regresi	73
4.4.1. Uji F (Uji Serempak)	74
4.4.2. Koefisien Determinasi (R^2)	74

4.4.3. Uji Statistik t	75
4.4.4. Persamaan Estimasi dengan <i>Intershep</i> Pembeda <i>Cross Effect</i>	76
4.4.5. Persamaan Estimasi dengan <i>Intershep</i> Pembeda <i>Period Effect</i>	80
4.5. Analisis Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen	82
4.5.1. Analisis Pengaruh Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah .	82
4.5.2. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah..	82
4.5.3. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah	83
4.5.4. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah	83
4.5.5. Analisis Pengaruh Total Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah..	84

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	85
4.2. Keterbatasan Penelitian	87
4.3. Saran	88
4.3.1. Saran Untuk Pemerintah	88
4.3.2. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya.....	89

DAFTAR PUSTAKA

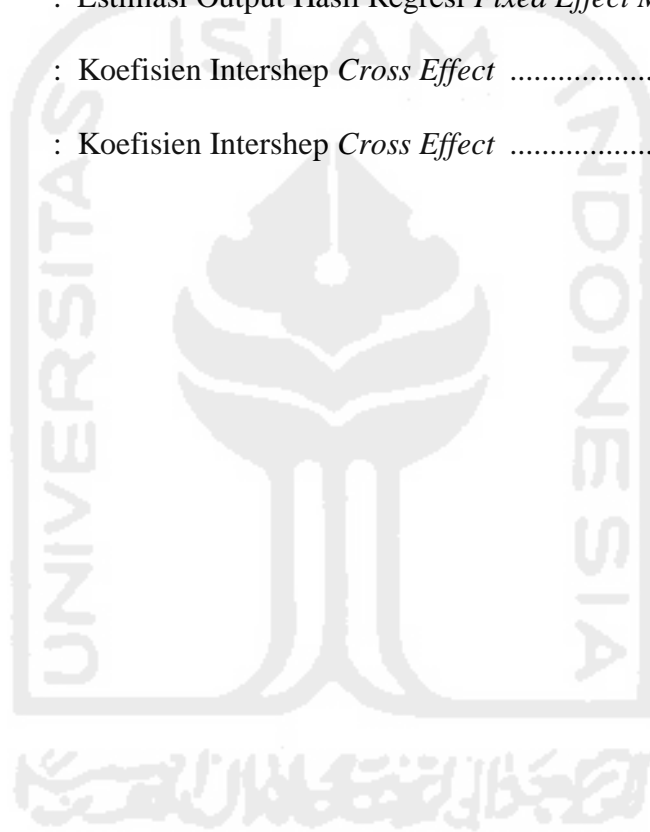
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	: Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sulawesi Menurut Provinsi tahun 2010-2014	3
Tabel 1.2.	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014	4
Tabel 1.3.	: JUmlah dan Presentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tengah 2010-2014	6
Tabel 1.4.	: Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2013-Maret 2014	7
Tabel 1.5.	: Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Tengah menurut daerah, September 2013-Maret 2014	8
Tabel 2.1.	: Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	26
Tabel 4.1.	: Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2014	55
Tabel 4.2.	: Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulteng, Semestes 2 Tahun 2014	57
Tabel 4.3.	: APBD Provinsi Sulawesi Tengah	59
Tabel 4.4.	: IPM Sulawesi Tengah Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota tahun 2013-2014	61
Tabel 4.5.	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014	63

Tabel 4.6.	: Estimasi <i>Output</i> Hasil Regresi PLS	66
Tabel 4.7.	: Estimasi <i>Output</i> Hasil Regresi <i>Fixed Effect</i>	67
Tabel 4.8.	: Estimasi <i>Output</i> Hasil Regresi <i>Random Effect</i>	68
Tabel 4.9.	: Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test</i>	70
Tabel 4.10.	: Hasil Pengujian <i>Hausman Test</i>	72
Tabel 4.11.	: Estimasi Output Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	73
Tabel 4.12.	: Koefisien Intershep <i>Cross Effect</i>	77
Tabel 4.13.	: Koefisien Intershep <i>Cross Effect</i>	80



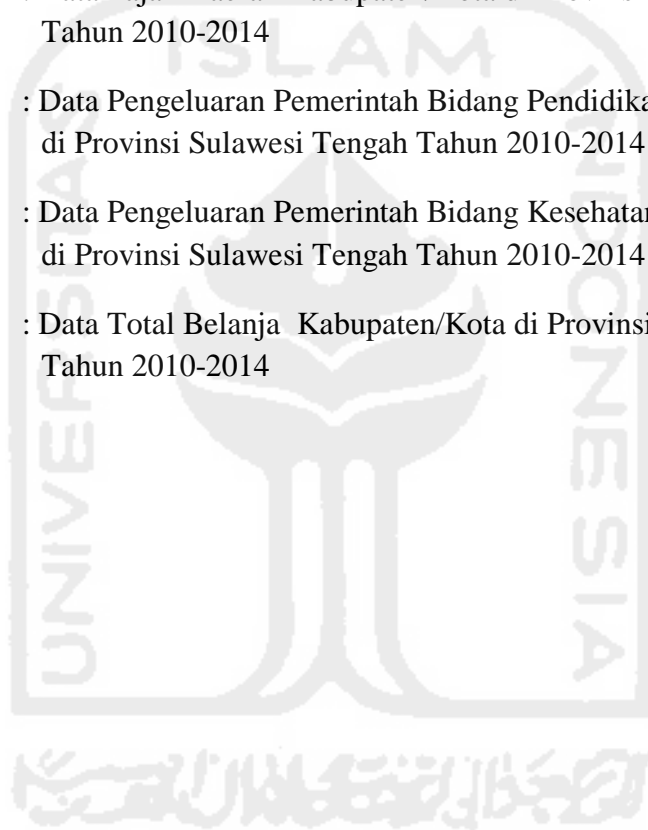
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. : Prosedur Pengujian Pemilihan Model	45
--------------------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014
- Lampiran 2 : Data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014
- Lampiran 3 : Data Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014
- Lampiran 4 : Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014
- Lampiran 5 : Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014
- Lampiran 6 : Data Total Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014



ABSTRAK

Paper ini memodelkan perilaku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Variabel-variabel Independen yang digunakan adalah Penduduk Miskin, Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Total Belanja, variable Dependennya IPM. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 11 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan metode Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan, Pajak Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan, Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan serta Total Belanja berpengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penduduk Miskin, Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan, Total Belanja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah maka membutuhkan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan (Mudrajad, 2006 dan Todaro, 2009).

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. (UNDP: *Humant Development Report* 2000:16). Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. Dalam skala internasional dikenal tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*), yang disepakati oleh pemimpin dunia dalam KTT 2000. *MDG* merupakan komitmen masyarakat internasional, khususnya negara yang sedang berkembang, terhadap visi pembangunan. Visi ini secara kuat menempatkan pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Secara nasional beberapa tahun

belakangan ini banyak program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengangkat kondisi sosial dan ekonomi. Kebijakan ini sesuai dengan rekomendasi *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam buku "*The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*" (BPS,2007) dengan menekankan perlunya aspek pembiayaan yang lebih memadai bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara eksplisit UNDP menyarankan bahwa Indonesia perlu memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia dan cara pembiayaannya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk.

Adapun 3 indikator tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per kapita. Berikut adalah data dari Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi-Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dari tahun 2010 – 2014.

Tabel 1.1

Tabel Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sulawesi menurut Provinsi tahun 2010-2014

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Sulawesi Utara	67.83	68.31	68.31	69.49	69.96
Sulawesi Tengah	63.29	64.27	65.00	65.79	66.43
Sulawesi Selatan	66.00	66.65	67.26	67.92	68.49
Sulawesi Tenggara	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07
Gorontalo	62.65	63.48	64.16	64.70	65.17
Sulawesi Barat	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam tabel 1.1 dari data Indeks Pembangunan Manusia di enam Provinsi di Pulau Sulawesi tersebut dapat kita lihat dan ketahui bahwa semua nilai rata-rata berkisar antara 59.74 sampai 69.96. Perkembangan IPM pada keenam provinsi yang ada di Pulau Sulawesi tersebut menunjukkan bahwa nilai IPM terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai 59.74 pada tahun 2010 dan nilai IPM tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 69.96 pada tahun 2014. Nilai IPM di ke enam Provinsi tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meski begitu belum bisa membenarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di enam Provinsi Pulau Sulawesi itu telah memadai terutama yang di fokuskan penulis yang akan di teliti yakni Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota		2010	2011	2012	2013	2014	Perkembangan Tahun 2014
1	Banggai Kepulauan	59,42	60,54	61,09	61,74	62,33	0,96
2	Banggai	64,09	64,63	65,44	66,39	67,11	1,08
3	Morowali	65,25	66,03	66,48	66,86	67,91	1,57
4	Poso	64,81	65,59	66,20	66,94	67,65	1,06
5	Donggala	59,73	60,15	61,33	63,38	63,55	0,27
6	Tolitoli	58,18	59,12	60,05	61,44	61,91	0,76
7	Buol	62,21	63,03	63,98	64,50	65,41	1,41
8	Parigi Moutong	59,17	60,36	61,13	61,98	62,20	0,35
9	Tojo Una-Una	58,33	58,87	59,55	60,32	61,15	1,38
10	Sigi	60,81	61,76	62,88	64,10	64,64	0,84
11	Kota Palu	77,39	78,10	78,36	78,65	79,12	0,60

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2 di atas merupakan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota. Salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumberdaya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari angka pendidikan dan kesehatan, serta juga perekonomian suatu daerah yang semakin membaik.

Berbagai program pembangunan yang telah ada juga di peruntukkan agar mengurangi jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses

pembangunan atau menikmati hasil pembangunan (Soegijokoet al, 2001). Masalah pengentasan kemiskinan memang merupakan hal yang rumit, tetapi setidaknya pemerintah bisa berusaha untuk memperbaiki dan menanggulangnya.

Menurut Lanjouw, dkk. (2001) dalam Ginting, et al (2008) dan Mirza (2012) menyatakan bahwa pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.

Perkembangan jumlah dan presentase penduduk miskin selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan tabel 1.3 di bawah ini periode tahun 2010-2014 jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah mengalami penurunan secara signifikan. Tahun 2010 sebanyak 474,99 ribu jiwa (18,07 persen), tahun 2011 (bulan Maret) sebanyak 424,39 ribu jiwa (15,83 persen), tahun 2011 (bulan September) sebanyak 433,66 ribu jiwa (16,04 persen), tahun 2012 (bulan Maret) sebanyak 420,05 ribu jiwa (15,40 persen), tahun 2012 (bulan September) sebanyak 410,98 ribu jiwa (14,94 persen), tahun 2013 (bulan Maret) sebanyak 406,97 ribu jiwa (14,67 persen) dan untuk tahun 2013 (bulan September) sebanyak 400,41 ribu jiwa (14,32 persen) sedangkan untuk tahun 2014 (bulan Maret) sebanyak 392,65 ribu jiwa (13,93 persen). Pada periode September 2013–

Maret 2014 terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sebesar 7,76 ribu jiwa dengan perubahan 0,39 persen point.

Tabel 1.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tengah 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Akselerasi (persen)	Persentase Penduduk Miskin			Perubahan (persen)
	Kota	Desa	Kota+Desa		Kota	Desa	Kota+Desa	
2010	54,22	420,77	474,99	-3,02	9,82	20,26	18,07	-0,91
2011 (Maret)	62,01	362,38	424,39	-10,65	9,46	17,89	15,83	-2,24
2011 (September)	66,14	367,52	433,66	2,18	10,05	17,96	16,04	0,21
2012 (Maret)	61,38	358,67	420,05	-3,14	9,24	17,38	15,40	-0,64
2012 (September)	60,40	350,58	410,98	-2,16	9,02	16,85	14,94	-0,46
2013 (Maret)	60,02	346,95	406,97	-0,98	8,90	16,53	14,67	-0,27
2013 (September)	64,37	336,04	400,41	-1,61	9,45	15,89	14,32	-0,36
2014 (Maret)	67,08	325,57	392,65	-1,94	9,77	15,27	13,93	-0,39

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah, Maret 2014 sebesar 392,65 ribu jiwa (13,93 persen) dibandingkan penduduk miskin September 2013 sebesar 400,41 ribu jiwa (14,32 persen). Hal ini berarti secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7,76 ribu jiwa atau secara relatif mengalami penurunan 0,36 persen point. Jika dilihat tingkat akselerasi pengurangan penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada periode September 2013 - Maret 2014 terjadi penurunan sebesar 1,94 persen. Selama periode September 2013 - Maret 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan secara absolut

bertambah sebesar 2,71 ribu jiwa dan daerah perdesaan secara absolut berkurang sebesar 10,47 ribu jiwa (lihat tabel 1.3).

Tabel 1.4
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
menurut Daerah, September 2013 - Maret 2014

Daerah/ Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase Penduduk miskin (%)
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
Perkotaan September 2013	227.894	96.178	324.072	64,37	9,45
Perdesaan September 2013	233.577	59.990	293.567	336,04	15,89
Maret 2014	240.937	63.038	303.975	325,57	15,27
Kota+Desa September 2013	232.192	68.808	301.000	400,41	14,32
Maret 2014	240.115	71.878	311.993	392,65	13,93

Sumber: Diolah dari data Susenas

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Periode September 2013 - Maret 2014, Akselerasi Garis Kemiskinan naik sebesar 3,65 persen, yaitu dari Rp.301.000,- keadaan September 2013 menjadi Rp.311.993, keadaan Maret 2014. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang,

pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2013, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 77,14 persen, turun menjadi 76,96 persen pada Maret 2014. Periode September 2013 - Maret 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan penurunan dari 2,28 pada September 2013 menjadi 2,18 pada Maret 2014.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Tabel 1.5

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Tengah menurut Daerah, September 2013 - Maret 2014

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan</i>			
September 2013	1,32	2,59	2,28
Maret 2014	1,21	2,49	2,18
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan</i>			
September 2013	0,28	0,61	0,53
Maret 2014	0,23	0,61	0,52

Sumber: Diolah dari data Susenas

Periode September 2013 - Maret 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan penurunan dari 2,28 pada September 2013 menjadi 2,18 pada Maret 2014. Hal tersebut berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan atau ke arah yang lebih baik. Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk daerah perkotaan mengalami penurunan dari 1,32 menjadi 1,21 sementara daerah pedesaan menunjukkan penurunan dari 2,59 menjadi 2,49. Artinya di daerah perkotaan ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin sudah lebih baik daripada daerah pedesaan. Indeks Keparahan Kemiskinan secara umum menurun dari 0,53 menjadi 0,52 pada periode yang sama. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin

semakin mengecil. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan mencapai 0,28 pada September 2013 menurun menjadi 0,23 pada Maret 2014. Sementara di daerah perdesaan pada periode yang sama tidak mengalami perubahan yakni 0,61. Baik di daerah perkotaan maupun perdesaan ketimpangan dan keparahan rata-rata pengeluaran penduduk miskin sudah semakin mengecil pada periode September 2013 - Maret 2013.

Pemerintah daerah tentunya tidak menginginkan penduduknya banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan atau terkategori penduduk miskin di daerahnya relatif banyak. Untuk itu pendapatan daerah dalam hal ini bersumber salah satunya dari pajak daerah dalam program pembangunan daerah seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar kemiskinan dapat berkurang di daerah tersebut. Pemerintah daerah mengeluarkan belanja pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Bila kesejahteraan masyarakat meningkat, salah satu indikatornya adalah berkurangnya penduduk miskin di daerah tersebut. Upaya meningkatkan IPM juga tidak terlepas dari bagaimana pemerintah daerah menggunakan pendapatan daerahnya untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang dapat menaikkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah Indonesia, menurut Guritno (2001) yaitu:

a. Peran Stabilisasi

Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda ekonominya kepada pihak swasta/perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain.

b. Peran Distribusi

Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat.

c. Peran Alokasi

Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimilikikan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran yang ada, maka tentunya diperlukan pula dana yang besar sebagai bentuk

pengeluaran segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan ke-tiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ke-tiga peran tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah salah satunya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Diharapkan pengeluaran pemerintah pada kedua sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan pendidikan dan kesehatan harus dipandang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, penduduk miskin, pengeluaran pemerintah dalam hal pendidikan dan kesehatan serta total belanja daerah untuk masyarakat adalah beberapa komponen selain pendapatan.

Berdasarkan hal-hal di atas tersebut, indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk melihat bagaimana tingkat kesejahteraan suatu daerah dalam sebuah pembangunan daerah. Oleh karena itu penulis akan mengangkat judul **“Pengaruh Penduduk Miskin, Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Serta Total Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Periode 2010 – 2014”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dilakukan penelitian, yaitu:

1. Apakah Penduduk Miskin berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah ?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah ?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah ?
4. Apakah Total Belanja berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Untuk menganalisa pengaruh Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Untuk menganalisa pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Untuk menganalisa pengaruh Total Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, adapun manfaat disebutkan antara lain adalah :

- 1. Bagi Penulis :** Penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, penulis juga dapat membandingkan antar teori dan praktek yang terjadi di lapangan. Serta sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. **Bagi Instansi Terkait** : Penelitian ini merupakan syarat wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi, maka penulis mengadakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.
3. **Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan** : Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa-mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sama atau sejenis. Disamping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

1.5. **Sistematika Penulisan Laporan Magang**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini bertisi tiga bagian: pertama, berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian- penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Kedua, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan

bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih. Ketiga, merupakan formalisasi hipotesis. Hipotesis ini dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah, sehingga hipotesis yang disusun adalah merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menguraikan tentang deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisis.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu, simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini. sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan memuat dan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penduduk miskin, pajak daerah maupun pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian, sekaligus memperkuat hasil analisis, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Maryani (2014), melakukan analisis IPM di Provinsi Jawa Tengah untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan jumlah penduduk miskin terhadap IPM. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu alokasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, alokasi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan jumlah penduduk miskin di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2009 dan selanjutnya diolah menggunakan metode panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap IPM. Meskipun berpengaruh positif pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan masih berpengaruh kecil terhadap IPM

hal ini menandakan bahwa pengeluaran untuk bidang tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya.

Ardiansyah (2010), menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara kurun waktu 20 tahun 1990-2009 menggunakan model analisis Ordinary Least Square (OLS). Hasil menunjukkan bahwa variabel independen (tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah) dapat memberi penjelasan pada variabel dependen (IPM) artinya bahwa ketiga variabel independen tersebut secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Arifin (2015), melakukan penelitian untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antarvariabel digunakan analisis data panel menggunakan pendekatan fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013 sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013.

Puteri (2009), melakukan pengolahan dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) terhadap data pengeluaran pemerintah bidang pendidikan serta kesehatan tahun 2005 dan data IPM tahun 2006, diperoleh suatu penemuan empiris bahwa pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan serta kesehatan tidak signifikan mempengaruhi tingkat pencapaian pembangunan manusia yang diwakili oleh IPM. Dengan demikian hipotesa awal yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah di kedua bidang tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap nilai IPM bila dipandang dalam konteks antar kabupaten/kota tidak dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang melakukan pengeluaran atau belanja yang besar di bidang pendidikan dan kesehatan belum tentu mencapai tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Astri, et al. (2013), melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Variabel penelitian yang digunakan adalah Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan, dan Kesehatan sebagai variabel independen; dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap IPM. Secara parsial, pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan

berpengaruh pada IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM.

Hidayahwati (2011), melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2003–2007. Variabel yang digunakan adalah tingkat kemandirian fiskal dilihat dari komponen PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BHUMD dan PAD lainnya yang sah) sebagai variabel independen dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Setiawan & Abdul (2013), memodelkan perilaku Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel-variabel independen yang dipertimbangkan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), Pajak Pendapatan (PPN), variabel dummy desentralisasi pemerintahan, variabel dummy krisis tahun 1997, dan variabel dummy krisis tahun 2008. Dengan menggunakan Error Correction Model (ECM), paper ini menemukan bahwa PDB dan PPN berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Estimasi model ECM menemukan bahwa krisis ekonomi tahun 2008 berpengaruh terhadap IPM, sementara krisis tahun 1997 dan desentralisasi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Usmaliadanti (2011), penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan serta jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*), dan menggunakan jenis data sekunder. Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat variasi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembangunan Manusia, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan Manusia.

Syahril (2014), studi ini mengkaji tentang pengaruh anggaran pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik dari tahun 2009-2012 yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (*path analysis*). Analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan dan mempermudah penafsiran melalui sajian tabel dan grafik, sedangkan analisis jalur digunakan untuk mengetahui apakah data mendukung teori, yang secara a-priori dihipotesiskan, yang mencakup kaitan struktural antar variabel terukur. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh langsung terhadap IPM.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995).

Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Produktivitas. Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
2. Pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan/peleuang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kestinambungan. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.
4. Pemberdayaan. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Pada tahun 1990, *United Nations Development Program* (UNDP) mengenalkan formula *Human Development Index* (HDI) atau disebut pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah merupakan negara/daerah yang maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan gabungan tiga dimensi, yaitu dimensi umur, dimensi manusia terdidik, dan dimensi standar hidup yang layak.

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Menurut UNDP, Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara

berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Secara umum metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia sama dengan metode penghitungan yang digunakan oleh UNDP.

IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga indikator komponen indeks, yaitu:

- 1) Indeks angka harapan hidup ketika lahir
- 2) Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani) dan angka melek huruf Latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih)
- 3) Indeks standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP-Purchasing Power Parity/paritas daya beli dalam rupiah).

Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$$

dimana :

$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup

$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah)

$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan.

Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut ;

$$\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{[X_{(i)\maks} - X_{(i)\min}]}$$

dimana :

$X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)

$X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$

$X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator $X_{(i)}$ disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM (=X(I))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720	300.000	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang

Sumber : BPS

2.2.2. Kemiskinan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara harfiah kata miskin diberi arti tidak berharta benda. Sayogyanya membedakan tiga tipe orang miskin, yakni miskin (*poor*), sangat miskin (*very poor*) dan termiskin (*poorest*). Penggolongan ini berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahun. Orang miskin adalah orang yang berpenghasilan kalau diwujudkan dalam bentuk beras yakni 320 kg/orang/tahun. Jumlah tersebut dianggap cukup memenuhi kebutuhan makan minimum (1,900 kalori/orang/hari dan 40 gr protein/orang/hari). Orang yang sangat miskin berpenghasilan antara 2240 kg, 320 kg beras/orang/tahun, dan orang yang digolongkan sebagai termiskin berpenghasilan berkisar antara 180 kg, 240 kg beras/orang/tahun. Menurut BPS, penduduk miskin adalah mereka yang asupan kalorinya di bawah 2,100 kalori berdasarkan kategori *food* dan *nonfood* diukur menurut infrastruktur antara lain jalan raya, rumah, serta ukuran sosial berupa kesehatan dan pendidikan.

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan menurut PBB didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain. Selain itu menurut *World Bank*, dalam definisi kemiskinan adalah: "*the denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative*

life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other”. (www.worldbank.org)

2.2.3. Indikator Kemiskinan

Masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khu susnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenaga kerjaan, dan ekonomi (konsumsi/kapita).

Indikator-indikator utama kemiskinan berdasarkan pendekatan di atas yang di kutip dari Badan Pusat Statistik, antara lain sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun kelompok.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9. Ketidakmampuan dan ketergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Selain BPS, UNDP dalam laporan *Human Development Report 1997* memperkenalkan ukuran kemiskinan dimana ukuran kemiskinan disebut dengan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index-HPI*). Kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivation*), yaitu kehidupan (lebih dari 30 persen di negara-negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari umur 40 tahun), pendidikan dasar (seperti diukur oleh presentase penduduk dewasa yang buta huruf, dengan penekanan pada hilangnya hak pendidikan perempuan), serta keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih ditambah presentase anak-anak dibawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan (Safi'i, 2011).

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, 1953 dalam Kuncoro, (1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan

absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisi penyebab kemiskinan.

Sharp (dalam Mudrajad, 1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Selain itu kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Kemiskinan muncul juga akibat adanya perbedaan akses dalam modal.

Kuncoro dalam Safi'i (2004) menyebutkan bahwa penyebab kemiskinan bisa dianalisis dari dua aspek, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Karena dua aspek tersebut memiliki saling keterkaitan. Adapun penyebab kemiskinan jika di pandang secara ekonomi adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja adalah rasio antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pada negara berkembang rasio tersebut lebih rendah dari negara maju sehingga jumlah kemiskinan di negara berkembang lebih tinggi dari negara maju.
- b) Lemahnya akses masyarakat terhadap faktor produksi. Lemahnya akses masyarakat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rendahnya akses modal usaha. Hal tersebut menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu mengembangkan usahanya.
2. Lemahnya masyarakat dalam mengakses pasar.
3. Sedikitnya kepemilikan aset.

Selain penyebab kemiskinan dipandang secara ekonomi, penyebab kemiskinan juga dapat dilihat secara sosial. Adapun hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Rendahnya akses pendidikan. Pada negara terbelakang, pendidikan masyarakatnya masih rendah sehingga tingkat produktivitasnya rendah dan akhirnya berdampak pada rendahnya penghasilan yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.
- b) Rendahnya akses fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan di negara terbelakang jauh lebih sedikit dan kualitasnya tertinggal dari negara maju. Pada masyarakat yang berkorelasi positif antara kemiskinan dengan akses kesehatan, diperlukan cara keluar dari rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan dengan melakukan proteksi terhadap masyarakat miskin melalui program seperti jamkesmas.

2.2.4. Karakteristik atau Ciri-ciri Penduduk Miskin

Emil Salim (1976) mengemukakan lima karakteristik kemiskinan, kelima karakteristik kemiskinan tersebut adalah :

1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri.
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi

dengan kekuatan sendiri.

3. Tingkat pendidikan pada umumnya sendiri.
4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas.
5. Diantara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin, yaitu :

1. Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan,
2. Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.
3. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja).
4. Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (*slum area*).
5. Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup), bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan sosial lainnya.

Kelompok penduduk miskin yang berada pada masyarakat pedesaan dan perkotaan, pada umumnya dapat digolongkan pada buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan, pengemis, dan pengangguran.

2.2.5. Pajak Daerah

Menurut UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapat lainnya, Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing. Dari kedua pernyataan di atas, didalam pengertian pajak daerah terkandung makna:

- a. Kontribusi orang pribadi/ badan yang bersifat memaksa.
- b. Dipungut berdasarkan Undang-undang / Peraturan Daerah.
- c. Tidak mendapat imbalan langsung.
- d. Digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing untuk tujuan kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut di dalam UU 28/2009 Pasal 1 dan 2, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas 5 (lima) jenis yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas 11 (sebelas) jenis, yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air

tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.2.6. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2001), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, melalui dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, meningkatkan output maupun kesempatan kerja, memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat *Keynes* dalam Sukirno (2001), bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan, karena apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja tingkat perekonomian tidak tercapai dan tingkat kesempatan kerja penuh tercapai, tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993). Artinya, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, Mangkoesoebroto (1993) menjelaskan bahwa model pembangunan dalam perkembangan pengeluaran pemerintah ini dikembangkan oleh Rostow (1960) dan Musgrave (1993) yang menghubungkan perkembangan

pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi 3 (tiga) tahap yaitu: tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

2.2.7. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat diklasifikasikan dalam dua kategori utama yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan kebutuhan pokok. Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi pendidikan dasar dan kesehatan. pendidikan merupakan suatu bentuk investasi

sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar, yang oleh pemerintah diterjemahkan dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pemerintah hendak menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah, sehingga diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Dalam pemenuhan anggaran tersebut amanat amandemen UUD 1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total anggaran (Syahril, 2010). Pendidikan merupakan sektor yang fundamental bagi sebuah negara karena pendidikan mampu memberikan manfaat positif bagi pembangunan. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan produktivitas, sehingga pendidikan diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Anggaran pendidikan yang besar jika dikelola dengan baik dan dialokasikan secara tepat diharapkan mampu meningkatkan tingkat melek huruf dan tingkat lama sekolah sehingga pada gilirannya akan meningkatkan IPM.

Sama halnya dengan pendidikan, Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan

masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas (Syahril, 2010).

Dalam UUD 1945 disebutkan kesehatan merupakan hak dasar (azasi) manusia, sehingga pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan perlindungan dan fasilitas kesehatan kepada rakyatnya. Apalagi dalam tujuan pembangunan nasional telah disebutkan setiap penduduk berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Maka wajar jika kesehatan dapat disebut sebagai investasi pemerintah pada belanja/pegeluaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Lains dan Pasay yang lebih menekankan aspek pendidikan dalam pembangunan manusia, Tjiptoherijanto (1989) melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana

kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah.

2.2.8. Total Belanja Daerah

Komponen dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (Darise, 2007).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kelompok belanja terdiri :

1. Belanja administrasi umum (belanja tak langsung) adalah belanja yang secara tak langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
2. Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung) adalah belanja yang secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
3. Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah aset.
4. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan.
5. Belanja tak disangka adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk kegiatan diluar rencana, seperti terjadinya rencana, seperti terjadinya bencana alam.

2.2.9. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga Penduduk Miskin berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Diduga Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Diduga Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Diduga Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Diduga Total Belanja berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen adalah Penduduk Miskin, Pajak Daerah dan Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan dan Kesehatan serta Total Belanja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan data panel dari tahun 2010 – 2014.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk kurun waktu (*time series*) tahunan dengan periode mulai dari tahun 2010 – 2014 yang bersifat data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka. Adapun sumber pengumpulan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, internet, jurnal, artikel yang telah dipublikasikan, penelitian terdahulu, dan literatur – literatur yang terkait dengan penelitian ini. Serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, yang disampaikan melalui media cetak. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dengan mencatat langsung, mengcopy dan mendownload dari sumber *website* yang bersangkutan.

3.3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data panel, yang artinya adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Sebagai hasilnya data set panel akan berisikan informasi observasi setiap individual data sampel. Data panel dapat berguna bagi peneliti untuk melihat dampak ekonomis yang tidak bisa terpisahkan antar setiap individu dalam beberapa periode. Hal ini tidak bisa didapatkan dari penggunaan data *cross section* atau data *time series* secara terpisah.

Ada 3 model yang dapat digunakan untuk menafsirkan data panel yaitu:

- 1) *Pooled Least Square* (PLS) atau metode *Common Effect*
- 2) *Fixed Effect Model* (FEM)
- 3) *Random Effect Model* (REM) , (Baltagi, 2005).

3.3.1. *Pooled Least Square* (PLS) Atau Metode *Common Effect*

Model pertama menggunakan data yang digabung kemudian diestimasi adalah merupakan penggunaan metode *Pooled Least Squares* (PLS) atau metode *Common Effect*. Koefisiennya menggambarkan dampak variabel independen. Terhadap variabel dependen konstan untuk setiap *cross section* dan *time series*. Artinya metode ini tidak memperhitungkan „*nature*“ dari perubahan yang terjadi di setiap *cross section* dan *time series* sehingga kompleksitas kenyataan sebenarnya tidak dapat dicerminkan dalam metode ini.

Persamaan model PLS sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + e_{it}$$

$$i = 1, \dots, N \text{ dan } t = 1, \dots, K$$

Di mana N adalah jumlah unit *cross section* (individu) dan T adalah jumlah *time series* (periode waktu). Proses estimasi menggunakan metode PLS dilakukan dengan menggabungkan unit *time series* dan unit *cross section* sehingga menghasilkan jumlah observasi sebanyak NT. Asumsi dasar pada pendekatan PLS adalah nilai intersep (β_0) dan nilai slope (β_1) antar unit *cross section* dan unit *time series* adalah konstan/sama.

3.3.2. Fixed Effect Model (FEM)

Metode ini memiliki beberapa kemungkinan asumsi yang bisa digunakan peneliti berdasarkan kepercayaan dalam memilih data, seperti:

- a) Intersep dan koefisien slope konstan dari setiap *cross section* di sepanjang waktu. Error term diasumsikan mampu mengatasi perubahan sepanjang waktu dan individu. Asumsi ini mengikuti asumsi dalam metode OLS.
- b) Koefisien slope konstan namun intersepnya bervariasi di setiap *cross section*.
- c) Seluruh koefisien baik slope maupun intersep bervariasi setiap individu.

Model ini memasukan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai *intersep* antar unit *cross section*. Pendekatan dengan memasukan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*). Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_j X_{it}^j + \sum_{i=2}^n \alpha_i D_i + U_{it}$$

$i = 1, \dots, N$ dan $t = 1, \dots, K$

keterangan :

Y_{it} = variabel terikat di waktu t untuk unit *cross section* i

α_i = *intersep* yang berubah – ubah antar unit *cross section*

X_{it}^j = variabel bebas ke- j di waktu t untuk unit *cross section* i

β_j = parameter untuk variabel bebas ke- j

U_{it} = komponen *error* di waktu t untuk unit *cross section* i

Keputusan memasukan variabel boneka (D_i) pada pendekatan *fixed effect* tidak dapat dipungkiri akan mengurangi jumlah *degree of freedom* yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi dari parameter yang diestimasi.

3.3.3. Random Effect Model

Widarjono (2013) menjelaskan bahwa dimasukkannya variabel *dummy* di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error term*) dikenal sebagai metode *random effect*.

Persamaan model *random effect* adalah sebagai berikut:

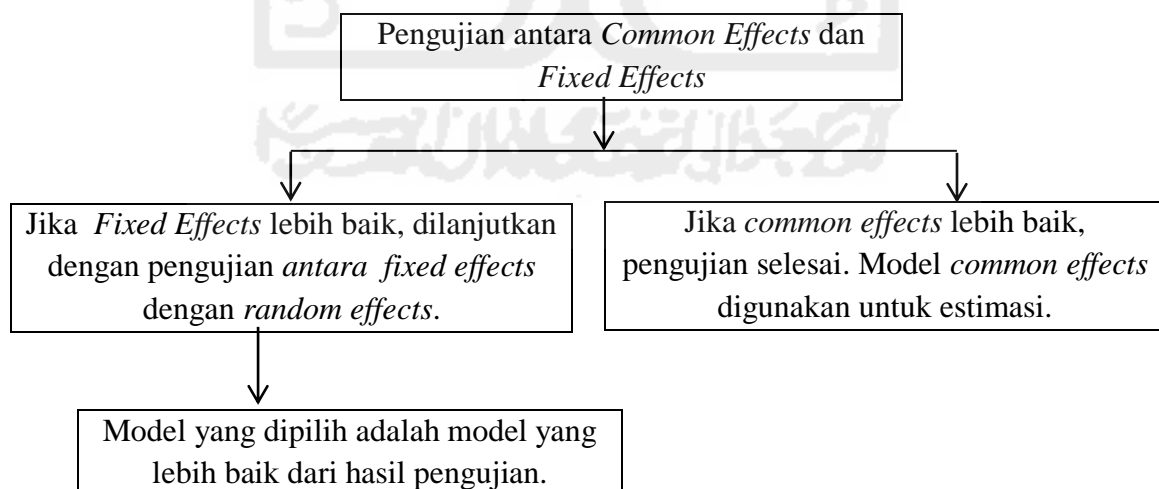
$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it}^j + u_{it} \rightarrow u_{it} = u_i + v_t + w_{it}$$

$i = 1, \dots, N$ dan $t = 1, \dots, K$

Pendekatan efek acak dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada pendekatan efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter hasil estimasi akan menjadi semakin efisien.

3.4. Pemilihan Model

Sebelum dilakukan pembahasan hasil model regresi panel data, akan dilakukan pemilihan model terbaik yang akan digunakan sebagai dasar melakukan analisis. Terdapat tiga uji yang bisa dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat (Sriyana, 2014), yaitu uji F untuk signifikansi *fixed effects*, uji LM untuk signifikansi *random effects* dan uji *Hausman* untuk signifikansi *fixed effects* dan *random effects*. Jadi secara ringkas penjelasan tersebut dapat disederhanakan dalam bagan berikut:



Gambar 3.1. Prosedur Pengujian Pemilihan Model

3.4.1 Uji Signifikansi *Common Effect* atau *Fixed Effect*

Uji F kita gunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *Fixed Effect* lebih baik dari model regresi *common effect*.

$$F = \frac{SSR_R - \frac{SSR_U}{q}}{\frac{SSR_U}{n - k}}$$

SSR_R dan SSR_U *sum of Squared residuals* metode *common effect* dan teknik *fixed effect*. q adalah jumlah restriksi metode *common effect* dan n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi metode *fixed effect*.

3.4.2. Uji LM Test

LM Test adalah pengujian untuk memilih model PLS atau model *random effect*. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : Model PLS (*Restricted*)

H_1 : Model *Random effect* (*Unrestricted*)

Formulasi untuk menguji hipotesa diatas dengan menggunakan tabel distribusi *chi_squares* seperti yang dirumuskan oleh Breusch Pagan :

$$\begin{aligned} LM &= \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T \hat{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2 \\ &= \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (T \bar{\hat{e}}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2 \end{aligned}$$

n = jumlah individu; T = jumlah periode waktu dan e adalah residual metode OLS.

Jika nilai LM Test (2Stat) hasil pengujian lebih besar dari χ^2 Tabel, maka hipotesa nol ditolak sehingga model yang kita gunakan adalah model random effect dan sebaliknya.

3.4.3. Uji Hausman Test

Uji hausman digunakan untuk memilih model *fixed effect* atau *random effect*. Gujarati (2012) menerangkan hipotesis nol yang mendasari uji Hausman adalah bahwa estimator-estimator *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* tidak memiliki perbedaan yang besar. Uji statistik yang dikembangkan oleh *Hausman* memiliki distribusi χ^2 asimtotis. Jika hipotesis nol ditolak maka kesimpulannya adalah *Random Effect Model* tidak tepat karena *random-effects* kemungkinan berkorelasi dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam hal ini, *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Random Effect Model*.

3.5. Pengujian Statistik

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R^2), pengujian koefisien regresi secara serentak (Uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (Uji T).

3.5.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin besar R^2 , semakin baik kualitas model, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen (Gujarati, 2003).

Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah :

- 1) Sebagai ukuran ketepatan/kecocokan garis regresi yang dibuat dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil R^2 , maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.
- 2) Untuk mengukur proporsi/persentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel x terhadap variabel y untuk mengukur proporsi/persentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel x terhadap variabel y.

3.5.2. Uji F

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

$$H_0: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0 \text{ (tidak ada pengaruh)}$$

$$H_a: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \neq 0 \text{ (ada pengaruh)}$$

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah :

- Terima H_0 jika F statistik < nilai F tabel, artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.
- Terima H_α jika nilai F statistik > nilai F tabel, artinya nilai suatu variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.

3.5.3. Uji T

Uji t statistik dilakukan untuk menguji pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel bebas yang lain konstan. Hipotesis nol yang digunakan adalah :

$$H_0: \beta_0 = 0$$

Artinya apakah variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan hipotesis alternatifnya adalah :

$$H_\alpha: \beta_1 \neq 0$$

Artinya apakah variabel independen merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung, jika nilai t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t hitung < t tabel maka H_1 ditolak, yang berarti variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Sulawesi Tengah

Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-5 di Indonesia setelah Papua, Kalimantan dan Sumatera. Bentuk unik menyerupai huruf K yang membujur dari utara keselatan dan tiga semenanjung yang membujur ketimur laut, timur dan tenggara. Pulau ini dibatasi oleh selat makasar dibagian barat yang menjadikannya terpisah dari Kalimantan serta dipisahkan dari kepulauan Maluku oleh laut Maluku

Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya di bagian Tengah Pulau Sulawesi. Provinsi yang biasanya disingkat dengan Sulteng ini didirikan pada tanggal 13 April 1964 berdasarkan Dasar Hukum UU No. 13 Tahun 1964. Dengan demikian, tanggal 13 April 1964 ini juga diperingati sebagai hari jadi Provinsi Sulawesi Tengah. Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kota Palu.

4.1.2. Geografis dan Demografis

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Tengah berada diantara $2^{\circ}22'$ – $3^{\circ}48'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}22'$ – $124^{\circ}22'$ Bujur timur. Provinsi Sulawesi Tengah berbatasan dengan Provinsi Gorontalo di sebelah Utaranya, sedangkan di sebelah Selatannya berbatasan dengan Provinsi

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Disebelah Barat Provinsi Sulawesi Tengah dikelilingi oleh Selat Makasar sedangkan disebelah Timurnya berbatasan dengan Provinsi Maluku.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.831.283 jiwa (2014). Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bangsa Provinsi Sulawesi Tengah adalah Suku Buol dan Suku Gorontalo. Seperti Provinsi lainnya yang berada di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tengah juga termasuk dalam zona waktu Indonesia Tengah atau WITA (Zona Waktu Internasional UTC +8 atau GMT +8).

Provinsi Sulawesi Tengah terbagi dalam 9 kabupaten dan 1 kota yakni kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali, Tojo Una-Una, Banggai, Banggai Kepulauan, Tolitoli, Buol dan Sigi serta Kota Palu. Namun di tahun 2013 terjadi pembentukan 2 kabupaten lagi yakni kabupaten Banggai Laut dan Morowali Utara. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah penduduk 449.157 jiwa, sedangkan Kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Palu sebanyak 362.202 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk adalah 1,95% per tahun (2010). Sementara penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang tinggal di daerah pemukiman dan

pedalaman ialah sekitar 30%, daerah pesisir 60%, dan kawasan kepulauan ialah 10%.

Tabel 4.1
Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Luas/Area (Km²)	Penduduk (Jiwa/Person)	Kepadatan- Penduduk(Jiwa/Km²)
Banggai Kepulauan	2.489	114.003	46
Banggai	9.673	348.003	36
Morowali	3.037	111.002	37
Poso	7.112	230.521	32
Donggala	4.275	290.915	68
Toli-toli	4.080	223.318	55
Buol	4.044	145.889	36
Parigi Moutong	5.090	449.157	88
Tojo Una-una	5.721	145.817	25
Sigi	5.196	226.876	44
Kota Palu	395	362.202	917
Jumlah/Total	51.112	2.684.177	1.384

Sumber : BPS Sulteng

Kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar yakni di Kabupaten Banggai sebesar 9.673 Km². Disusul terbesar kedua yakni Kabupaten Poso sebesar 7.112 Km². Luas wilayah terkecil yakni di Kota Palu sebesar 395 Km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 449.157 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 88 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak kedua terdapat di Kota Palu sebanyak 362.202 jiwa dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni sebesar 917 jiwa. Data ini pada tahun 2014, kemungkinan ditahun ini bias saja bertambah lagi.

Berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 470/1207/Ro. Adm. Pum Perihal Penyampaian Data Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah. Data Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2014 (Semester II) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri hasil Konsolidasi dan Pembersihan berjumlah 2.813.651 jiwa dan jumlah KK berjumlah 958.352.

Berikut Rekapitulasi Data Kependudukan :

Table 4.2

**Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kabupaten/Kota Provinsi
Sulteng, Semester 2 Tahun 2014**

Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Banggai	23	337	124.383	182.731	172.933	355.664
Poso	19	166	84.276	123.692	114.748	238.440
Donggala	16	167	92.446	149.431	139.457	288.888
Toil-toli	10	104	83.193	107.439	101.149	208.588
Buol	11	115	40.943	64.082	60.795	124.877
Morowali	9	133	45.689	63.117	59.098	122.215
Banggai Kepulauan	12	144	37.039	58.703	56.832	115.535
Parigi Moutong	23	283	146.303	226.950	213.129	440.079
Tojo Una-una	12	146	48.167	77.688	72.903	150.591
Sigi	15	176	86.272	124.402	116.939	241.341
Kota palu	8	45	113.114	182.337	177.261	359.598
Total	158	1.816	907.825	1.360.572	1.285.244	2.645.816

Sumber : Data hasil konsolidasi ditjen Dukcapil Kemendagri

4.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja. Kabupaten/Kota yang merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Kabupaten/Kota dua yang termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Serta Kabupaten/Kota dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya

pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah. Berkaitan dengan itu semua pemerintah memiliki wewenang untuk mengalokasikan dana untuk tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah yang tercatat di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Tabel 4.3
APBD Provinsi Sulawesi Tengah

Anggaran	2012	2013	2014*)
APBD(triliun rp)			
DIPA	1,78	1,96	2,38
Realisasi	1,41	2,14	2,44
DAU (triliun rp)	0,91	0,99	1,09
PAD (triliun rp)	0,44	0,61	0,77 Ket. *)

Ket. *) : Angka Sementara

Sumber : Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2016

Berkaitan dengan tabel, pemerintah Sulawesi Tengah mengalokasikan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2014 sebesar 2,38 triliun rupiah, dengan harapan untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang ditargetkan, namun ternyata anggaran tahun 2013 terealisasi melebihi dari DIPA yang telah direncanakan yaitu mencapai 2,44 triliun rupiah. Realisasi anggaran ini mengalami kenaikan 14,01 persen bila dibanding realisasi anggaran tahun lalu sebesar 2,14 triliun rupiah. Dari Total anggaran DIPA sebesar 2,38

triliun tahun 2014, PAD hanya berkontribusi sebesar 0,77 triliun rupiah sementara DAU sebesar 1,09 triliun rupiah. APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari PAD tahun 2014 meningkat dibandingkan PAD tahun sebelumnya yaitu dari 0,61 triliun rupiah naik menjadi 0,77 triliun rupiah.

Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang perbaikan tingkat IPM yang ada di Sulawesi Tengah. Tingginya angka IPM memperlihatkan bahwa tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Tengah.

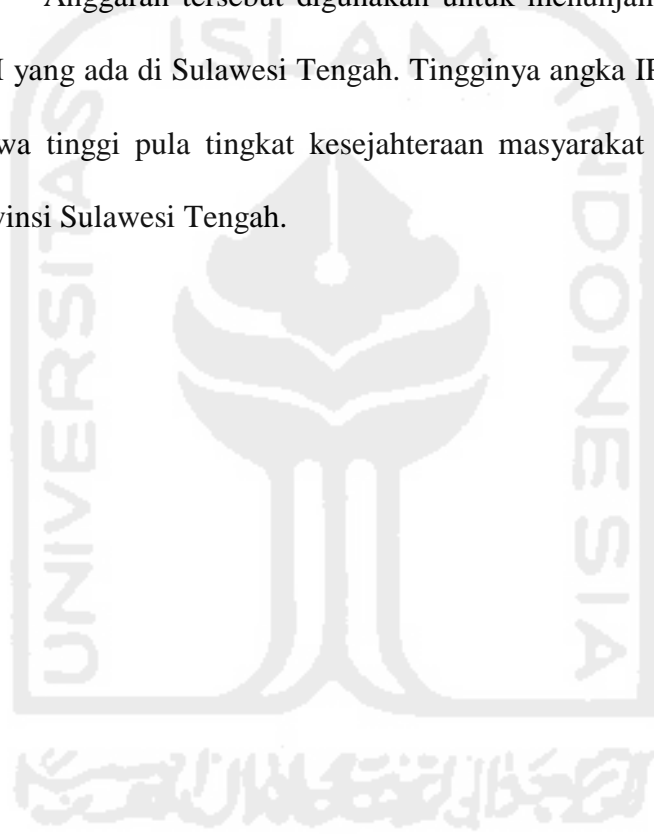


Table 4.4

**IPM Sulawesi Tengah Menurut Komponen Dan
Kabupaten/Kota Tahun 2013-2014**

Kabupaten/Kota		Angka Harapan Hidup (tahun)		Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran perkapita disesuaikan	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	Banggai Kepulauan	64.20	64.25	12.21	12.70	7.38	7.39	6.974,88	7.038,05
2	Banggai	69.72	69.73	11.78	12.32	7.63	7.71	8.673,58	8.717,98
3	Morowali	68.05	68.06	11.33	12.12	7.87	7.97	9.989,41	10.059,00
4	Poso	69.98	69.99	12.39	12.87	8.42	8.49	7.768,42	7.869,11
5	Donggala	65.76	65.79	12.38	12.41	7.76	7.80	7.184,30	7.237,29
6	Tolitoli	63.73	63.75	11.99	12.26	7.65	7.69	6.862,96	6.959,41
7	Buol	66.64	66.66	12.54	13.03	8.04	8.30	7.338,22	7.430,79
8	Parigi Moutong	63.16	63.17	11.61	11.72	6.68	6.71	8.662,87	8.722,99
9	Tojo Una-Una	63.84	63.87	11.10	11.28	7.23	7.62	6.998,45	7.110,69
10	Sigi	68.65	68.66	11.48	11.82	8.07	8.11	7.139,79	7.237,68
11	Kota Palu	69.93	69.93	14.77	15.15	11.14	11.17	14.283,48	14.413,45
	Sulawesi Tengah	67.02	67.18	12.36	12.71	7.82	7.89	8 500,57	8 601,52

Sumber : BPS Sulteng

Berdasarkan table 4.3 Indeks Pembangunan Manusia menurut Komponen di Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tengah dari tahun 2013 ke tahun 2014 rata-rata di setiap Kabupaten/Kota terjadi kenaikan angka. Komponen angka harapan hidup pada tahun 2013 tertinggi yakni Kabupaten Poso sebesar 69.98 sedang terendah yakni Kabupaten Parigi Moutong sebesar 63.16, begitu pun pada tahun 2014 masih dengan Kabupaten yang sama. Komponen angka harapan lama sekolah pada tahun 2013 tertinggi yakni Kota Palu sebesar 14.77 sedang terendah yakni Kabupaten Tojo Una-una sebesar 11.10, begitupun pada tahun 2014 masih dengan Kabupaten/Kota yang sama. Komponen rata-rata lama sekolah pada tahun 2013 tertinggi yakni Kota Palu sebesar 11.14 sedang terendah yakni Kabupaten Parigi Moutong sebesar 6.68, begitu pun pada tahun 2014 juga Kabupaten/Kota yang sama yang memiliki IPM tertinggi dan Terendah. Kemudian yang terakhir Komponen Pengeluaran Perkapita disesuaikan pada tahun 2013 yang tertinggi sebesar 14.283,48 yakni Kota Palu sedang yang terendah sebesar 6.862,96 yakni Kabupaten Toli-toli. Pada tahun 2014 juga Kabupaten/Kota yang sama. Komponen-komponen tersebut digunakan untuk mengukur IPM di Sulawesi Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota.

Tabel 4.5**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014**

	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	Perkembangan Tahun 2014
1	Banggai Kepulauan	59,42	60,54	61,09	61,74	62,33	0,96
2	Banggai	64,09	64,63	65,44	66,39	67,11	1,08
3	Morowali	65,25	66,03	66,48	66,86	67,91	1,57
4	Poso	64,81	65,59	66,20	66,94	67,65	1,06
5	Donggala	59,73	60,15	61,33	63,38	63,55	0,27
6	Tolitoli	58,18	59,12	60,05	61,44	61,91	0,76
7	Buol	62,21	63,03	63,98	64,50	65,41	1,41
8	Parigi Moutong	59,17	60,36	61,13	61,98	62,20	0,35
9	Tojo Una-Una	58,33	58,87	59,55	60,32	61,15	1,38
10	Sigi	60,81	61,76	62,88	64,10	64,64	0,84
11	Kota Palu	77,39	78,10	78,36	78,65	79,12	0,60
	Sulawesi Tengah	63,29	64,27	65,00	65,79	66,43	0,97
	Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	0,86

Sumber : Badan Pusat Statistik

4.2. Hasil Regresi Data Panel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data panel, yaitu gabungan dari data runtun waktu (*time series*) selama 5 tahun, mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan data silang (*cross section*) sebanyak 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Data diperoleh dari Departemen Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS) serta literatur lain yang terkait. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen, yaitu Penduduk Miskin, Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan & Kesehatan serta Total Belanja, sedangkan variabel dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Analisis hasil regresi ini menjelaskan model regresi dan diuji sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan model yang terbaik sehingga mampu menjelaskan permasalahan yang hendak dijawab dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam menjelaskan pengaruh Penduduk Miskin (PM), Pajak Daerah (PD), Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan & Kesehatan (PPBP) & (PPBK), serta Total Belanja (TB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan pengujian model dengan metode estimasi data panel.

Model yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$IPM = \alpha_0 + \alpha_1 (X1it) + \alpha_2 (X2it) + \alpha_3 (X3it) + \alpha_4 (X4it) + \alpha_5 (X5it) + \varepsilon it$$

Dimana :

$\alpha_{1,2,3,4,5}$ = nilai koefisien variabel independen

Y = Indeks Pembangunan Manusia

X1 = Penduduk Miskin

X2 = Pajak Daerah

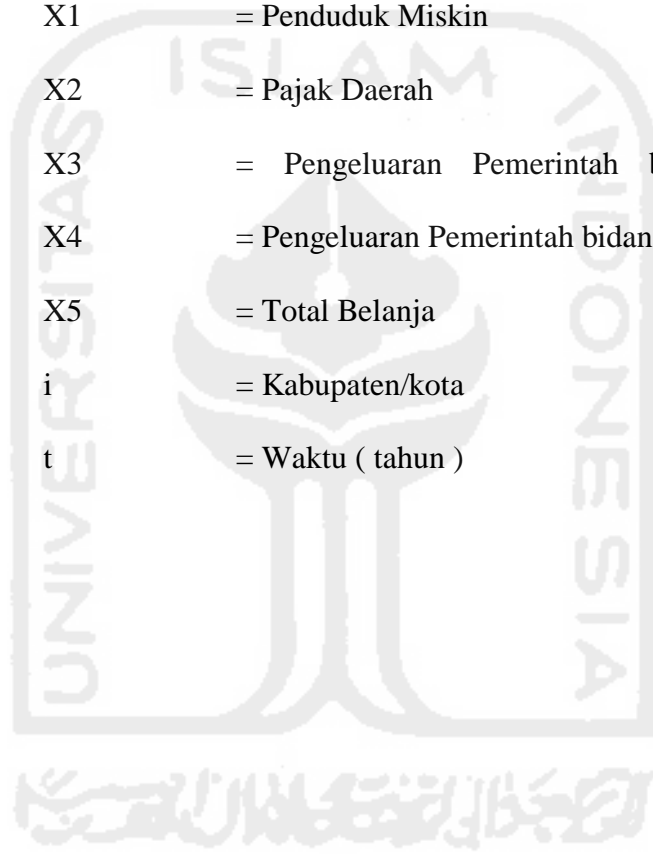
X3 = Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan

X4 = Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan

X5 = Total Belanja

i = Kabupaten/kota

t = Waktu (tahun)



Berikut merupakan hasil regresi data panel dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu *Pooled Least Square* atau metode *Common*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

4.2.1. Estimasi *Pooled Least Square* atau *Common Effect*

Hasil pegujian regresi data panel dengan menggunakan metode *Pooled Least Square* atau *Common Effect* adalah sebagai berikut :

Table 4.6
Estimasi Output Hasil Regresi PLS

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/06/16 Time: 23:50				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61.95341	1.977187	31.33412	0.0000
X1	-5.21E-05	2.89E-05	-1.800157	0.0780
X2	0.000279	7.21E-05	3.873709	0.0003
X3	0.029727	0.017842	1.666143	0.1021
X4	0.000983	0.000808	1.216682	0.2296
X5	-0.008882	0.007403	-1.199851	0.2360
R-squared	0.691419	Mean dependent var	64.24818	
Adjusted R-squared	0.659931	S.D. dependent var	5.211101	
S.E. of regression	3.038874	Akaike info criterion	5.163520	
Sum squared resid	452.5031	Schwarz criterion	5.382502	
Log likelihood	-135.9968	Hannan-Quinn criter.	5.248202	
F-statistic	21.95830	Durbin-Watson stat	0.678575	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v 8.1

Dari hasil pengolahan regresi data panel diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.686293, yang menunjukkan variabel-variabel independent mampu menjelaskan 68,6293% terhadap variabel dependent, sedangkan sisanya dijelaskan diluar model.

4.2.2 Estimasi *Fixed Effect Model*

Hasil pegujian regresi data panel dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Estimasi Output Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/06/16 Time: 23:51				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.96580	4.829986	14.89980	0.0000
X1	-0.000263	0.000102	-2.577240	0.0139
X2	-7.68E-05	3.28E-05	-2.337947	0.0246
X3	0.003944	0.005536	0.712402	0.4805
X4	0.000326	0.000283	1.152372	0.2562
X5	0.002771	0.002014	1.376109	0.1766
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.990033	Mean dependent var	64.24818	
Adjusted R-squared	0.986199	S.D. dependent var	5.211101	
S.E. of regression	0.612185	Akaike info criterion	2.094482	
Sum squared resid	14.61605	Schwarz criterion	2.678433	
Log likelihood	-41.59825	Hannan-Quinn criter.	2.320301	
F-statistic	258.2532	Durbin-Watson stat	1.776581	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v 8.1

Dari hasil pengolahan regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.990121, yang menunjukkan variabel-variabel independent mampu menjelaskan 99,0121% terhadap variabel dependent. Hasil estimasi diatas menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross section* (Kabupaten/Kota) pada konstanta model penelitian.



4.2.3 Estimasi *Random Effect Model*

Hasil pegujian regresi data panel dengan menggunakan metode *Random Effect Model* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Estimasi Output Hasil Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 12/06/16 Time: 23:55				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 55				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.59271	2.133144	30.28052	0.0000
X1	-0.000102	4.23E-05	-2.423391	0.0191
X2	-5.60E-05	2.88E-05	-1.940517	0.0581
X3	0.011267	0.004802	2.346112	0.0231
X4	0.000549	0.000207	2.653082	0.0107
X5	0.001611	0.001950	0.825926	0.4128
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.282979	0.9329
Idiosyncratic random			0.612185	0.0671
Weighted Statistics				
R-squared	0.642979	Mean dependent var	7.649903	
Adjusted R-squared	0.606548	S.D. dependent var	1.304815	
S.E. of regression	0.818455	Sum squared resid	32.82355	
F-statistic	17.64936	Durbin-Watson stat	0.939157	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.209048	Mean dependent var	64.24818	
Sum squared resid	1159.853	Durbin-Watson stat	0.271585	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v 8.1

Dari hasil pengolahan regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.206078, yang menunjukkan variabel-variabel independent mampu menjelaskan 20,6078% terhadap variabel dependent. Hasil estimasi diatas menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross section* (Kabupaten/Kota) pada konstanta model penelitian.

4.3. Pemilihan Model

Karena data yang dianalisis merupakan data panel, maka harus ditentukan metode pendekatan analisis. Pendekatan analisis panel data yang diuji adalah pendekatan *pooled least square*, pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*) melalui uji Chow untuk memilih antara pendekatan *pooled least square* atau pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan uji Hausman untuk memilih antara pendekatan efek tetap (*fixed effect*) atau efek acak (*random effect*) sehingga mendapatkan pendekatan yang paling tepat terhadap model.

4.3.1 Likelihood Ratio Test (Chow Test)

Likelihood ratio test dilakukan untuk mengetahui apakah model yang lebih baik untuk digunakan adalah pendekatan *pooled least square (common effect)* atau pendekatan efek tetap (*fixed effect*). Uji ini dilakukan dengan prosedur uji F-statistic dengan hipotesis :

$H_0 = Pooled Least Square (common)$ lebih baik daripada *Fixed Effect Model*.

$H_1 = Fixed Effect Model$ lebih baik daripada *Pooled Least Square (common)*.

Hasil *Likelihood ratio test* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9

Hasil Pengujian Likelihood Ratio Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	116.841429	(10,39)	0.0000
Cross-section Chi-square	188.797112	10	0.0000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v 8.1

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh angka probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 dengan demikian maka diketahui bahwa nilai p-value lebih kecil dari α (0,05), sehingga kesimpulan dari hasil uji *Chow* adalah menolak H_0 , sehingga model *Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan daripada *Pooled Least Square (common effect)*.

4.3.2 Hausman Test

Hausman test digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan hipotesis :

$H_0 = \text{Random Effect Model}$ lebih baik daripada *Fixed Effect Model*.

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$ lebih baik daripada *Random Effect Model*.

Hasil pengujian *Hausman Test* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	43.583085	5	0.0000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v 8.1

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh nilai *chi-square statistic* sebesar 43.614968. Dengan membandingkan nilai *chi-square statistic* tersebut dengan nilai *chi-square* kritis ($\alpha = 0,05$) yaitu 11.07, maka disimpulkan bahwa hasil pengujian menolak H_0 karena nilai *chi-square statistic* lebih besar daripada *chi-square* kritis. Sehingga dari kesimpulan tersebut maka pendekatan yang lebih baik digunakan ialah *Fixed Effect Model (REM)*.

4.4. Analisis Hasil Regresi

Berdasarkan pemilihan model yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman, model analisis yang paling tepat dan paling baik yang digunakan adalah *Fixed effect Model*. Kemudian dengan melihat tabel 4.11 dari hasil regresi tersebut penulis membuat Analisis hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 4.11

Estimasi Output Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/06/16 Time: 23:51				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.96580	4.829986	14.89980	0.0000
X1	-0.000263	0.000102	-2.577240	0.0139
X2	-7.68E-05	3.28E-05	-2.337947	0.0246
X3	0.003944	0.005536	0.712402	0.4805
X4	0.000326	0.000283	1.152372	0.2562
X5	0.002771	0.002014	1.376109	0.1766
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.990033	Mean dependent var	64.24818	
Adjusted R-squared	0.986199	S.D. dependent var	5.211101	
S.E. of regression	0.612185	Akaike info criterion	2.094482	
Sum squared resid	14.61605	Schwarz criterion	2.678433	
Log likelihood	-41.59825	Hannan-Quinn criter.	2.320301	
F-statistic	258.2532	Durbin-Watson stat	1.776581	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v 8.1

4.4.1. Uji F (Uji Serempak)

Uji F dilakukan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan koefisien regresi signifikan dalam menentukan nilai variabel terikat. Uji F merupakan pengujian terhadap variabel bebas (independent variable) secara bersama-sama yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Jika F-statistik < F-kritis (tabel) berarti H_0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen, tetapi jika F-hitung > F-tabel berarti H_0 ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Fixed Effect Model* menunjukkan nilai F-statistik sebesar 258.2532 dan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000. Dengan membandingkan nilai F-statistik tersebut dengan nilai F-tabel sebesar 2.59 ($\alpha=1\%$) maka diketahui bahwa F-statistik > F-tabel sehingga disimpulkan bahwa semua *regressor* (variabel independen) secara bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.4.2. Koefisien Reterminasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang telah diestimasi dengan data sesungguhnya. Hasil pengujian

dengan menggunakan model regresi *Fixed Effect Model* menghasilkan nilai R^2 sebesar 0.990033 yang berarti bahwa sebanyak 99,00 persen variasi atau perubahan pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen dalam model, sedangkan sisanya (0,99 persen) dijelaskan oleh sebab lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

4.4.3. Uji Statistika t

Pengujian ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, termasuk juga intersep secara individu. Pengujian hipotesis melalui uji statistik t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh individual masing-masing variabel bebas dalam model terhadap variabel dependennya. Selain menguji signifikansi dengan *probability (t-statistic)* dengan α sebesar 5 persen, juga dilakukan uji arah atas nilai koefisiennya.

Hasil pengujian regresi data panel dengan metode Fixed Effect Model menunjukkan bahwa nilai t-statistik variabel Penduduk Miskin sebesar 2.577240. Nilai t-tabel diperoleh angka 1.679 sehingga nilai t-statistik > t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Penduduk Miskin secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Nilai t-statistik variabel Pajak Daerah sebesar 2.337947. Nilai t-tabel dengan $\alpha= 5$ persen diperoleh angka 1.679 sehingga nilai t-statistik > t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel

IPM. Nilai t-statistik variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan sebesar 0.712402. Nilai t-tabel dengan $\alpha=5$ persen diperoleh angka 1.679 sehingga nilai t-statistik < t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Nilai t-statistik variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan sebesar 1.152372. Nilai t-tabel dengan $\alpha=5$ persen diperoleh angka 1.679 sehingga nilai t-statistik < t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Nilai t-statistik variabel Total Belanja sebesar 1.376109. Nilai t-tabel dengan $\alpha=5$ persen diperoleh angka 1.679 sehingga nilai t-statistik < t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Total Belanja secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM.

4.4.4. Persamaan Estimasi dengan *Intersep* Pembeda *Cross Effect*

Persamaan estimasi Cross Effect dihasilkan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan hasil estimasi dengan nilai estimasi koefisien Cross Effect. Cross Effect di peroleh berdasarkan estimasi yang mengikuti jumlah individu dalam penelitian, maka sesungguhnya koefisien tersebut akan dimiliki oleh masing-masing unit atau individu (Sriyana, 2014).

Tabel 4.12

Koefisien Intersep *Cross Effect*

CROSSID	Effect
1	-4.868511
2	0.032293
3	1.955855
4	2.524308
5	0.887936
6	-5.684552
7	-4.179145
8	6.745785
9	-6.393288
10	-3.776286
11	12.75560

Sumber : Olah Data Eviews v.8.1

Persamaan regresi berdasarkan tabel *Cross Effect* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Banggai Kepulauan

$$Y_t = (-\mathbf{4.86} + \mathbf{71.96}) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$IPM_t = \mathbf{67.1} - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

2. Kabupaten Banggai

$$Y_t = (\mathbf{0.03} + \mathbf{71.96}) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$IPM_t = \mathbf{71.99} - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

3. Kabupaten Morowali

$$IPM_t = (\mathbf{1.59} + \mathbf{71.96}) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$IPM_t = \mathbf{73.55} - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

4. Kabupaten Poso

$$IPM_t = (\mathbf{2.52} + \mathbf{71.96}) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$IPM_t = 74.48 - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

5. Kabupaten Donggala

$$IPM_t = (0.88+71.96) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$IPM_t = 72.84 - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

6. Kabupaten Toli-toli

$$IPM_t = (-5.68+71.96) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$IPM_t = 66.28 - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

7. Kabupaten Buol

$$IPM_t = (-4.17+71.96) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$IPM_t = 67.79 - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

8. Kabupaten Parigi Moutong

$$IPM_t = (6.74+71.96) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$IPM_t = 78.7 - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

9. Kabupaten Tojo Una-una

$$IPM_t = (-6.39+71.96) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$IPM_t = 65.57 - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

10. Kabupaten Sigi

$$IPM_t = (-3.77+71.96) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$IPM_t = 68.19 - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

11. Kota Palu

$$IPM_t = (12.75+71.96) - 2.63X1_t - 7.68X2_t + 3.944X3_t - 3.26X4_t + 2.771X5_t$$

$$IPM_t = 84.71 - 2.63X1_t - 7.68X2_t + 3.944X3_t - 3.26X4_t + 2.771X5_t$$

Dari hasil tersebut dapat terlihat besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk Kabupaten Banggai Kepulauan IPMnya adalah sebesar 67.1, Kabupaten Banggai sebesar 71.99, Kabupaten Morowali sebesar 73.55, Kabupaten Poso sebesar 74.48, Kabupaten Donggala sebesar 72.84, Kabupaten Toli-toli sebesar 66.28, Kabupaten Buol sebesar 67.79, Kabupaten Parigi Moutong sebesar 78.7, Kabupaten Tojo Una-una sebesar 65.57, Kabupaten Sigi sebesar 68.19, dan yang terakhir untuk Kota Palu sebesar 84.71.

4.4.5. Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda *Period Effect*

Persamaan estimasi *Period Effect* dihasilkan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan hasil estimasi dengan hasil estimasi koefisien masing-masing periode dari koefisien *period effect*. Hasil estimasi *fixed effect* ini menghasilkan koefisien *period effect* sesuai dengan jumlah periode yang di gunakan dalam analisis regresi, dimana dalam hal ini ada 5 periode waktu.

Tabel 4.13

Koefisien Intersep *Period Effect*

DATEID	Effect
1/1/2010	-1.972579
1/1/2011	-0.950184
1/1/2012	0.018534
1/1/2013	1.022364
1/1/2014	1.881866

Sumber : Olah Data Eviews v.8.1

Persamaan Regresi :

Tahun 2010

$$IPM = (-1.97+71.96) - 2.63X1_t - 7.68X2_t + 3.944X3_t - 3.26X4_t + 2.771X5_t$$

$$IPM = 69.99 - 2.63X1_t - 7.68X2_t + 3.944X3_t - 3.26X4_t + 2.771X5_t$$

Tahun 2011

$$IPM = (-0.95+71.96) - 2.63X1_t - 7.68X2_t + 3.944X3_t - 3.26X4_t + 2.771X5_t$$

$$IPM = 71.01 - 2.63X1_t - 7.68X2_t + 3.944X3_t - 3.26X4_t + 2.771X5_t$$

Tahun 2012

$$\text{IPM} = (0.018+71.96) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$\text{IPM} = 71.97 - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

Tahun 2013

$$\text{IPM} = (1.022+71.96) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$\text{IPM} = 72.98 - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

Tahun 2014

$$\text{IPM} = (1.881+71.96) - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

$$\text{IPM} = 73.841 - 2.63X_{1t} - 7.68X_{2t} + 3.944X_{3t} - 3.26X_{4t} + 2.771X_{5t}$$

Berdasarkan tabel periode effect tersebut dapat kita lihat besarnya perbedaan Indeks Pembangunan Manusia setiap tahunnya di Provinsi Sulawesi Tengah dari yang terendah sampai yang tertinggi. Koefisien Periode effect pada tahun 2010 sebesar 69.99, pada tahun 2011 sebesar 71.01, tahun 2012 sebesar 71.97, tahun 2013 sebesar 72.98 dan pada tahun 2014 sebesar 73.84.

4.5. Analisis Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen

Berikut akan diuraikan hasil pengujian atas kelima hipotesis yang telah dirumuskan.

4.5.1. Analisis Pengaruh Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah dengan probabilitas sebesar 0.0139. Variabel Penduduk Miskin memiliki koefisien sebesar -0.000263. Artinya jika setiap penambahan 1 ribu jiwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah maka tingkat Indeks Pembangunan Manusia akan menurun. Hasil ini sesuai dengan penelitian Maryani (2014) yang menyatakan bahwa Penduduk Miskin berpengaruh positif pada signifikansinya terhadap IPM, meskipun begitu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan masih berpengaruh kecil terhadap IPM, hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk bidang tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya.

4.5.2. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah dengan probabilitas sebesar 0.0246. Variabel Pajak Daerah memiliki koefisien sebesar -0.0000768. Artinya jika setiap penurunan 1 jutaan

rupiah pajak daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat. Hal ini sama dengan hasil penelitian Setiawan & Abdul (2013) yang menyatakan bahwa Pajak Pendapatan (PPN) berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

4.5.3 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah dengan probabilitas sebesar 0.4805. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan memiliki koefisien sebesar 0.003944. Hasil ini sesuai dengan penelitian Usmalıadanti (2011) dengan perolehan hasil adalah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

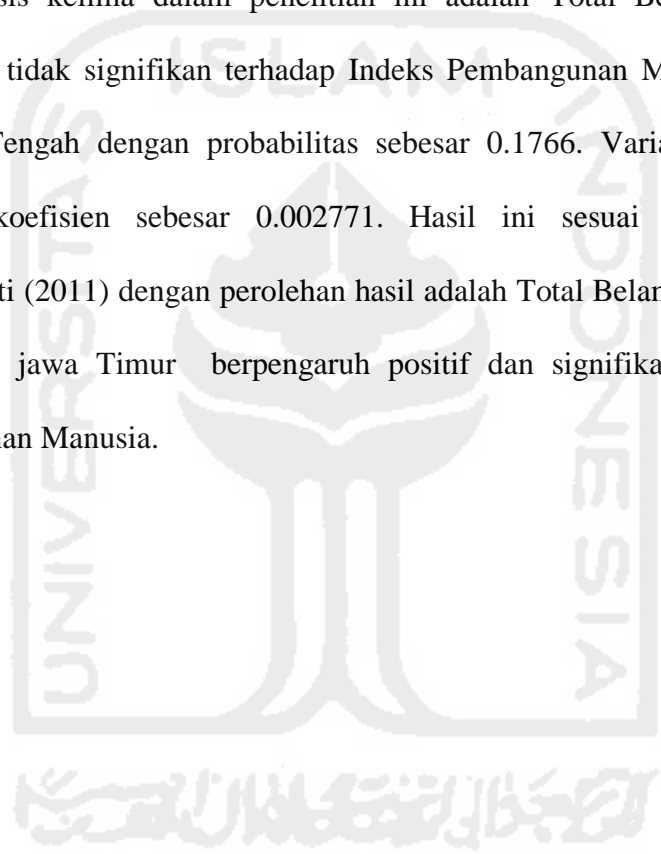
4.5.4 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah dengan probabilitas sebesar 0.2562. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki koefisien sebesar 0.000326. Hasil ini sesuai dengan penelitian Astri, et al (2013) dengan

perolehan hasil adalah Pengeluaran pemerintah daerah pada sektor Kesehatan tidak berpengaruh pada IPM.

4.5.5. Analisis Pengaruh Total Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah Total Belanja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah dengan probabilitas sebesar 0.1766. Variabel Total Belanja memiliki koefisien sebesar 0.002771. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hidayahwati (2011) dengan perolehan hasil adalah Total Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian terhadap hipotesis yang disusun sebagaimana telah dibahas dalam Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Penduduk Miskin secara individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.* Ini berarti bahwa ketika Penduduk Miskin meningkat maka akan berpengaruh terhadap penurunan nilai IPM Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, demikian pula sebaliknya.
2. *Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.* Ini berarti bahwa ketika Pajak Daerah menurun maka akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai IPM Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, demikian pula sebaliknya.
3. *Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan secara individu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.*

Hal ini diduga karena langkah-langkah yang di ambil oleh pemerintah guna pendidikan masih belum terealisasikan dengan seutuhnya dalam pendidikan seperti kurangnya akses terhadap masyarakat untuk bias menikmati pendidikan, ketidakmerataan dalam akses dana pendidikan seperti ketidakmerataan dana di desa dan kota serta jender, masih kurangnya sarana dan prasarana guna menunjang pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil, serta dalam penyerapan dana banyak pihak-pihak yang memanipulasi dana yang seharusnya di alokasikan bagi pendidikan untuk kepentingan sendiri.

4. *Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan secara individu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.*
Hal ini diduga karena biaya atau dana yang diperuntukkan guna kesehatan tidak terealisasikan dengan secara menyeluruh.
5. *Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Total Belanja secara individu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.* Hal ini diduga total dana belanja terhadap daerah tidak secara terbuka terbagi antara belanja-belanja masing-masing keseluruhan menjadi tidak terinci dengan baik sehingga dana yang ada tidak terealisasikan dengan sempurna.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah membuktikan secara empiris terkait pengaruh Penduduk Miskin, Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Total Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia, khususnya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun penelitian ini masih terdapat keterbatasan antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen saja sehingga belum mencakup semua faktor-faktor yang mempengaruhi IPM.
2. Penelitian ini mencoba menganalisis komponen APBD namun hanya terbatas pada Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Total Belanja sehingga untuk penelitian selanjutnya sebaiknya ditambah dengan variabel lain yang berasal dari komponen APBD untuk dapat memberikan model penelitian yang lebih baik.
3. Objek penelitian terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga kesimpulan yang diperoleh belum dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh wilayah Indonesia.

5.3. Saran

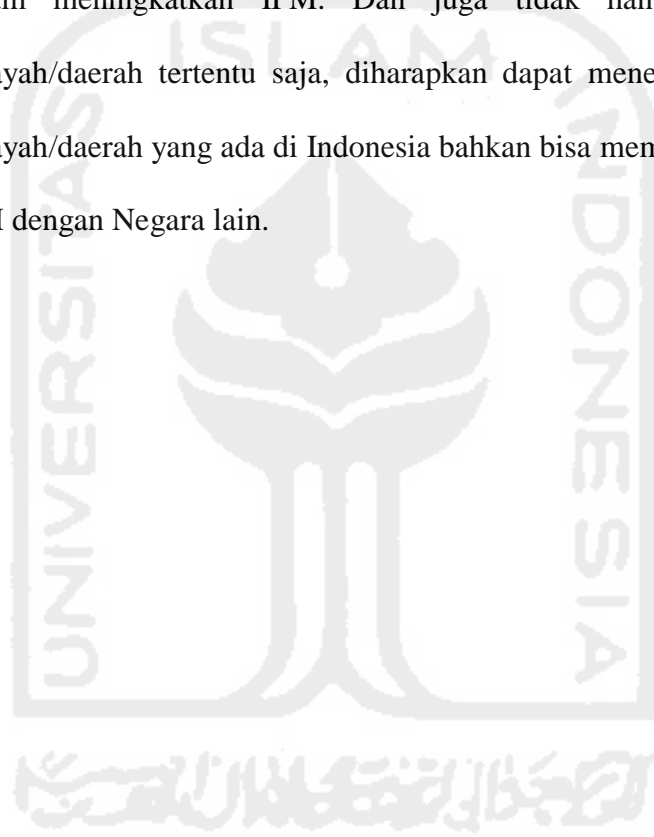
5.3.1. Saran Untuk Pemerintah

1. Pemerintah Daerah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab serta membuat kebijakan yang lebih lagi agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan, penuntasan masyarakat miskin akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
2. Sehubungan dengan permasalahan pajak, jika pemerintah setiap tahun tetap mengupayakan peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah maka pemerintah harus menggerakkan pertumbuhan perekonomian rakyat terlebih dahulu, pembangunan harus diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat termasuk penyediaan fasilitas umum dan pemberian pelayanan secara memadai.
3. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan mengalokasikan belanja yang lebih tinggi untuk kepentingan kesehatan, pendidikan, dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat.

4.

5.3.2. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini baru menggunakan sebagian kecil dari komponen APBD, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharap dapat menambah variabel lain dalam komponen APBD untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan IPM. Dan juga tidak hanya berfokus pada wilayah/daerah tertentu saja, diharapkan dapat meneliti keseluruhannya wilayah/daerah yang ada di Indonesia bahkan bisa membandingkan tingkat IPM dengan Negara lain.



Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i (2011), "Bank Syariah Dari Teori ke Praktik", Gema Insani, Jakarta.
- Ardiansyah (2010), "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara", Universitas Sumatra Utara, Fakultas Ekonomi, Medan.
- Baltagi, Badi H. (2005), "Econometric Analysis of Panel Data", Edisi 3, Wiley.
- BPS-Statistic Indonesia, UNDP, BAPPENAS (2004), "National Human Development Report 200, The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia.
- Christina, Usmaliadanti (2011), "Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2009", Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darise, Nurlan (2007), "Pengelolaan Keuangan Daerah", Indeks, Jakarta.
- Emil, Salim (1996), "Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris", Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ginting, Paham dan Syafrizal Helmi Situmorang (2008), "Filsafat Ilmu dan Metode Riset", USU Press, Medan.
- Gujarati, Damodar N Dan Dawn C. Porter (2013), "Dasar-Dasar Ekonometrika", Buku 1: Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Gujarati, Damodar N Dan Dawn C. Porter (2012), "Dasar-Dasar Ekonometrika" Buku 2: Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Guritno, Mangkoesobroto, DR.Mec (1993), "Ekonomi Publik", Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Guritno, Mangkoesobroto (2001), "Ekonomi Publik", Edisi-III, BPFE, Yogyakarta.
- Hidayahwati (2011) "Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur", Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Kuncoro, Mudrajad (2006), "Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif", Erlangga, Jakarta.

- Lanjouw Petter, dkk. (2001) "Poverty Education and health in Indonesia : Who Benefits From Public Spending", World Bank Discussion Paper No.339, Washington.
- Mirza, Denni Sulistio (2012) "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009", Economics Development Analysis Journal. EDAJ 1 (1), ISSN 2252-6560. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Mochammad, Yuli Arifin (2015), "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013", Universitas Jember (UNEJ).
- Mudrajad, Kuncoro (1997), "Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan", Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad Bhakti Setiawan, Abdul Hakim (2013), "INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A dan Peggy B. Musgrave (1993), "Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek", Erlangga, Jakarta.
- Ramadhanera Puteri, Madya (2009), "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan) Terhadap Pembangunan Manusia Dalam Konteks Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat", Other thesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sadono, Sukirno (2001) "Pengantar Teori Mikroekonomi", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman J (2003), "Produktivitas Kerja Pengertian dan Ruang Lingkupnya", Prisma, Jakarta.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati et al. (2001), "Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia". PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Sriyana, Jaka Dr. (2014), "Metode Regresi Data Panel". Edisi ke-1 cetakan pertama, EKONISIA, Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Syahril, (2014) “Analisis Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Tjiptoherijanto, Prijono (1989), “Untaian Pembangunan Sumberdaya Manusia”, FEUI, Jakarta.

Tri Maryani, (2014) “Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah”, UPN “V” YOGYAKARTA, Fakultas Ekonomi, Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta.

Todaro, et al (2006), “Pembangunan Ekonomi”, Edisi ke 9, Erlangga, Jakarta.

Widarjono, Agus (2013) “Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya : Disertai Panduan Eviews”, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Ul Haq, Mahbub. “Human Development Report: The Human Development Concept”.

www.bps.go.id

www.bpssulteng.go.id

[www.bappenas.go .id](http://www.bappenas.go.id)

www.bi.co.id, Pengeluaran Pemerintah

www.hdr.undp.org

www.jabar.bps.go.id, Indeks Pembangunan Manusia.

www.susenas.com

www.undp.com, Human Development Index.

www.worldbank.org

<http://kpu-sultengprov.go.id/arsip/922>

http://sulteng.bps.go.id/endback/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Sulawesi-Tengah-2016.pdf

LAMPIRAN

Lampiran I

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Banggai Kepulauan	59.42	60.54	61.09	61.74	62.33
Banggai	64.09	64.63	65.44	66.39	67.11
Morowali	65.25	66.03	66.48	66.86	67.91
Poso	64.81	65.59	66.20	66.94	67.65
Donggala	59.73	60.15	61.33	63.38	63.55
Tolitoli	58.18	59.12	60.05	61.44	61.91
Buol	62.21	63.03	63.98	64.50	65.41
Parigi Moutong	59.17	60.36	61.13	61.98	62.20
Tojo Una-Una	58.33	58.87	59.55	60.32	61.15
Sigi	60.81	61.76	62.88	64.10	64.64
Kota Palu	77.39	78.10	78.36	78.65	79.12

Lampiran II

Data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014

Dalam Ribu Jiwa

Kabupaten/Kota	2010 Ribu Jiwa	2011 Ribu Jiwa	2012 Ribu Jiwa	2013 Ribu Jiwa	2014 Ribu Jiwa
Banggai Kepulauan	33500	31800	30200	29400	28240
Banggai	39100	37200	35300	33800	32450
Morowali	41900	39800	37700	35400	34040
Poso	45300	43000	40800	41300	39650
Donggala	53900	51100	48400	49600	47560
Tolitoli	34200	32400	30700	30600	29460
Buol	24800	23500	22300	21600	20820
Parigi Moutong	83400	79100	75000	75500	74960
Tojo Una-Una	33200	31500	29900	29700	27370
Sigi	32400	30800	29200	27600	26490
Kota Palu	33500	31800	30100	25900	25660

Lampiran III

Data Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014

Dalam Jutaan Rupiah

Kabupaten/Kota	2010 Jutaan rupiah	2011 Jutaan rupiah	2012 Jutaan rupiah	2013 Jutaan rupiah	2014 Jutaan rupiah
Banggai Kepulauan	7459.740	3225.000	3418.600	3442.000	3471.000
Banggai	5238.650	6745.793	8025.000	16075.000	21647.957
Morowali	5400.000	8279.930	6675.000	6705.000	13355.000
Poso	3565.000	3995.000	5790.000	5351.097	9269.169
Donggala	10096.500	13272.933	15196.530	16094.933	18866.758
Tolitoli	3305.490	3495.990	3814.650	4298.220	6158.668
Buol	3602.415	2642.937	3779.123	2934.204	4508.345
Parigi Moutong	3112.772	3174.147	3275.000	3615.420	6815.420
Tojo Una-Una	2402.344	2758.261	2812.786	3414.649	5128.712
Sigi	818.014	1450.000	1876.000	3653.885	6236.500
Kota Palu	17535.642	22930.491	37000.000	42597.966	55535.000

Lampiran IV

Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014

Dalam Jutaan Rupiah

Kabupaten/Kota	2010 Jutaan rupiah	2011 Jutaan rupiah	2012 Jutaan rupiah	2013 Jutaan rupiah	2014 Jutaan rupiah
Banggai Kepulauan	124707.1510	143768.2610	192422.2211	199440.9442	128994.0200
Banggai	33526.3720	245897.8932	287853.8715	374798.9262	429546.7360
Morowali	164531.5303	181546.3226	229169.7619	286698.4042	165024.9619
Poso	172867.3669	203523.5121	309402.8419	292701.3822	358316.5575
Donggala	140938.6135	253317.8108	281470.3690	316057.1743	334230.3890
Tolitoli	121677.9693	167265.0573	184850.6302	192735.2232	215011.2654
Buol	127885.5177	148604.7181	175307.7982	181993.3522	2005666.5820
Parigi Moutong	145272.0229	188299.2647	232396.3681	208000.2697	331149.3225
Tojo Una-Una	124411.9422	149387.0947	166852.7067	183585.6061	210563.9818
Sigi	128043.2956	171610.8700	230434.8550	256534.8412	266134.2174
Kota Palu	212337.9744	295732.4632	348282.3722	426903.6575	441784.4255

Lampiran V

Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014

Dalam Jutaan Rupiah

Kabupaten/Kota	2010 Jutaan rupiah	2011 Jutaan rupiah	2012 Jutaan rupiah	2013 Jutaan rupiah	2014 Jutaan rupiah
Banggai Kepulauan	31019.215	37579.652	44439.740	52586.781	37121.431
Banggai	35283.032	70910.762	75442.372	93362.551	111499.626
Morowali	51561.286	55895.009	79546.013	103605.432	45575.527
Poso	54080.248	63057.807	64899.771	74818.326	75621.447
Donggala	33477.686	46027.716	48935.906	59523.660	80681.273
Tolitoli	41682.187	52835.397	62373.203	70000.217	83785.348
Buol	36669.244	40675.929	48227.761	53180.655	61766.971
Parigi Moutong	40574.362	51842.917	66152.786	84535.229	123985.679
Tojo Una-Una	36569.809	45426.040	51098.593	64095.907	83974.993
Sigi	27220.877	57307.916	44272.767	48552.388	55570.699
Kota Palu	64920.130	86148.577	112120.197	228967.698	178179.338

Lampiran VI

Data Total Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014

Dalam Jutaan Rupiah

Kabupaten/Kota	2010 Jutaan rupiah	2011 Jutaan rupiah	2012 Jutaan rupiah	2013 Jutaan rupiah	2014 Jutaan rupiah
Banggai Kepulauan	404759.152	433674.029	552095.365	645777.325	493709.051
Banggai	619057.354	666760.625	756400.908	962957.604	1133987.192
Morowali	578270.330	588617.095	753329.269	866548.676	557153.660
Poso	537870.208	555855.416	727900.464	789474.165	941959.160
Donggala	461794.171	620968.252	665573.502	797770.533	845240.563
Tolitoli	405906.446	490835.963	562527.825	653465.500	733126.126
Buol	520443.711	489158.274	523837.107	521141.918	607664.859
Parigi Moutong	485491.340	559436.604	676506.303	751049.833	932833.431
Tojo Una-Una	416869.850	462318.977	520985.482	571173.336	683699.120
Sigi	432338.793	506310.734	575071.587	666906.294	724987.639
Kota Palu	511814.534	644100.120	758191.599	1034756.470	1089134.318

Kabupaten/Kota	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4	X5
BangKep	2010	59.42	33500	3159	125	310	405
BangKep	2011	60.54	31800	3225	144	376	434
BangKep	2012	61.09	30200	3419	192	444	552
BangKep	2013	61.74	29400	3442	199	526	646
BangKep	2014	62.33	28240	3471	229	571	494
Banggai	2010	64.09	39100	5238	235	353	619
Banggai	2011	64.63	37200	6746	246	709	667
Banggai	2012	65.44	35300	8025	288	754	756
Banggai	2013	66.39	33800	16075	375	934	963
Banggai	2014	67.11	32450	21648	430	1115	1134
Morowali	2010	65.25	41900	5400	165	516	578
Morowali	2011	66.03	39800	8280	182	559	589
Morowali	2012	66.48	37700	6675	229	795	753
Morowali	2013	66.86	35400	6705	287	1036	867
Morowali	2014	67.91	34040	13355	165	4558	557
Poso	2010	64.81	45300	3565	173	541	538
Poso	2011	65.59	43000	3995	204	631	556
Poso	2012	66.20	40800	5790	309	649	728
Poso	2013	66.94	41300	5351	293	748	789
Poso	2014	67.65	39650	9269	358	756	942
Donggala	2010	59.73	53900	10096	141	335	462
Donggala	2011	60.15	51100	13273	253	460	621
Donggala	2012	61.33	48400	15197	281	489	666
Donggala	2013	63.38	49600	16095	316	595	798
Donggala	2014	63.55	47560	18867	334	807	845
Toli-toli	2010	58.18	34200	3305	122	417	406
Toli-toli	2011	59.12	32400	3496	167	528	491
Toli-toli	2012	60.05	30700	3815	185	624	563
Toli-toli	2013	61.44	30700	4298	193	700	653
Toli-toli	2014	61.91	29460	6159	215	838	733
Buol	2010	62.21	24800	3602	128	367	520
Buol	2011	63.03	23500	3643	149	407	489
Buol	2012	63.98	22300	3779	175	482	524
Buol	2013	64.50	21600	3934	182	532	521
Buol	2014	65.41	20820	4508	201	618	608
Parigi Moutong	2010	59.17	83400	3112	145	406	485
Parigi Moutong	2011	60.36	79100	3174	188	518	559
Parigi Moutong	2012	61.13	75000	3275	232	662	677
Parigi Moutong	2013	61.98	75500	3615	208	845	751
Parigi Moutong	2014	62.20	74960	6815	331	1240	933
Tojo Una-una	2010	58.33	33200	2402	124	366	417
Tojo Una-una	2011	58.87	31500	2758	149	454	462
Tojo Una-una	2012	59.55	29900	2813	167	511	521
Tojo Una-una	2013	60.32	29700	3415	184	641	571

Tojo Una-una	2014	61.15	27370	5129	211	840	684
Sigi	2010	60.81	32400	818	128	272	432
Sigi	2011	61.76	30800	1450	172	373	506
Sigi	2012	62.88	29200	1876	230	443	575
Sigi	2013	64.10	27600	3654	257	486	667
Sigi	2014	64.64	26490	6237	266	556	725
Kota Palu	2010	77.39	33500	17535	212	649	512
Kota Palu	2011	78.10	31800	22930	296	861	644
Kota Palu	2012	78.36	30100	37000	348	1121	758
Kota Palu	2013	78.65	25900	42598	427	2290	1035
Kota Palu	2014	79.43	25660	55535	442	2782	1089

